BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : SUARA PEMBARUAN
Subyek : Insentif Karbon
Edisi : 25/ September/2007
Hari : Selasa
Halaman : 1

RI Dorong Insentif Karbon

- Rumgapres/Abror Rizki



Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendengarkan penjelasan Juru Bicara Kepresidenan Dino Patti Djalal (kiri), saat memberikan keterangan pers bersama Sekjen PBB Ban Ki-moon (kedua dari kanan) dan wakil dari forum Kerangka Kerja Konvensi Perubahan Iklim PBB (United Nations Framework Convention on Climate Change/UNFCCC), menyangkut hasilpertemuan paralel mengenai perubahan iklim dan lingkungan hidup di Markas Besar PBB, New York, Senin (24/9) waktu setempat atau Selasa (25/9) pagi WIB.

Sidang PBB yang membahas isu utama mengenai pemanasan global, merupakan peluang besar bagi Indonesia mendapatkan dukungan pendanaan dari dunia internasional.

[NEW YORK] Indonesia mendorong adanya kesepakatan mengenai insentif karbon. Hal itu terkait dengan status Indonesia yang selama ini dikenal sebagai eksportir karbon yang membahayakan lingkungan.

Dorongan itu disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, saat menyampaikan penjelasan kepada pers bersama Sekjen PBB Ban Ki-moon, mengenai hasil sejumlah pertemuan menyangkut isu perubahan iklim, di Markas Besar PBB, New York, Senin (24/9) sore waktu setempat, atau Selasa (25/9) WIB pagi. Demikian dilaporkan wartawan *SP* **Wim Tangkilisan** dari New York, Selasa pagi.

Presiden menegaskan, meskipun dikenal dunia sebagai eksportir karbon, Indonesia juga menderita akibat dampak dari pemanasan global. Oleh karena itu, dalam pertemuan bersama 11 negara pemilik hutan tropis yang berlangsung Senin siang,

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup

antara lain disepakati perlunya insentif menyangkut pengelolaan karbon. Insentif karbon merupakan sebuah mekanisme insentif yang diberikan kepada negara-negara yang mampu mengurangi emisi gas karbon mereka.

Dijelaskan, selama ini mekanisme insentif karbon dinilai terlalu kompleks dan tidak merata. "Oleh karenanya perlu ada pengaturan mengenai karbon, bagaimana mengatur transfer teknologi dan insentif pendanaannya," jelas Presiden.

Sementara itu, Sekjen PBB menegaskan, pemanasan global telah menjadi persoalan bersama, sehingga harus didorong investasi untuk penyelamatan iklim dan lingkungan.

"Teknologi, ilmu pengetahuan, dan sumber daya sudah ada. Sehingga untuk mengatasi pemanasan global harus diselesaikan melalui konsensus dan kemauan politik," ujar Ban.

PBB, lanjutnya, telah me- nyiapkan mekanisme dan sistem yang bisa dipakai sebagai landasan kerja bersama. Di samping itu, Amerika Serikat (AS) juga telah berkomitmen untuk ikut serta di dalamnya. Namun, dia menegaskan, keikutsertaan AS dan semua negara dalam aksi bersama mengatasi pemanasan global, harus mengikuti aturan PBB. "PBB harus menjadi pemimpin," tegasnya.

Kompensasi

Terkait dengan peran Indonesia, Kepala Laboratorium Klimatologi Departemen Geometereologi MIPA Institut Pertanian Bogor, Rizaldi Boer, kepada *SP,* Selasa pagi, menjelaskan, Indonesia harus mampu memanfaatkan peluang untuk memperoleh kompensasi dari negara-negara maju.

"Kalau dilihat emisi gas rumah kaca di tingkat global, 70 persen berasal dari negara maju dan industri. Sementara, 30 persen dari negara berkembang. Sebenarnya, yang wajib menurunkan emisi adalah negara maju dan industri. Negara berkembang hanya sukarela. Walaupun demikian, pemanasan global adalah masalah dunia. Kalau ditinjau kembali di negara kita, justru emisi gas rumah kaca akibat kerusakan hutan, deforestasi, dan alih guna lahan. Inilah yang seharusnya diperhatikan Indonesia. Posisi Indonesia sangat signifikan bagi negara-negara maju," jelasnya.

Dia mengatakan, upaya penurunan emisi melalui pencegahan konversi hutan atau kerusakan hutan akan memberikan kontribusi sangat signifikan terhadap pencegahan pemanasan global. "Negara maju dan industri sangat bergantung pada kita," katanya.

Oleh karena itu, muncul usul Reduction Emission from Deforestation (RED) atau pengurangan emisi dari deforestasi. "Inilah agenda penting dalam pertemuan internasional membahas isu pemanasan global di Bali mendatang. Bagaimana RED bisa diimplementasikan bagi negara-negara pemilik hutan tropis," katanya.

Mekanisme RED, lanjut Rizaldi, adalah adanya kompensasi dari negara-negara maju dan industri apabila negara-negara berkembang bisa menurunkan kerusakan hutan dan sebagainya.

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup

Dikatakan, *carbon trading* atau perdagangan karbon dapat menjadi peluang mengurangi gas seperti karbondioksida dan metana, yang memberi efek rumah kaca yang ujungnya meningkatkan pemanasan global. Peluang tersebut terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia. *Carbon trading* merupakan respons dari Protokol Kyoto yang mewajibkan negara-negara maju untuk mengurangi emisi rumah kaca, sebaliknya negara-negara berkembang tidak diwajibkan.

Sementara itu, Koordinator World Wild Fund (WWF) Indonesia, Muhammad Suhud, mengatakan, proyek *carbon trading* di Indonesia memiliki masa depan yang cerah, khususnya di sektor kehutanan. Saat ini, *carbon trading* sudah berjalan di sektor energi, dan akan diperluas di sektor kehutanan yang memiliki peluang yang sangat besar.

"Debt Swap"

Secara terpisah, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Paskah Suzetta menilai, sidang PBB yang membahas isu utama mengenai pemanasan global, merupakan peluang besar bagi Indonesia mendapatkan dukungan pendanaan dari dunia internasional, khususnya untuk memperbaiki dan mengelola masalah lingkungan hidup.

Merujuk pada pengalaman Indonesia sebelumnya dengan Jerman terkait dengan proposal konversi utang dengan program penyelamatan lingkungan (*debt to nature swap*), Paskah mengatakan, cara tersebut bisa dipakai kembali melalui pembicaraan bilateral antarnegara. Presiden diharapkan bisa menindaklanjutinya ke beberapa negara yang memiliki kepedulian tinggi terhadap masalah lingkungan.

Sebaliknya, mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli mengatakan, Sidang PBB tidak bisa dijadikan patokan dalam perbaikan masalah lingkungan hidup di Indonesia. Sebab, berdasarkan pengalaman sebelumnya, sidang setiap tahun itu hanya menjadi ritual tanpa ada tindak lanjut berarti dari setiap kepala negara.

Dikatakan Rizal, kondisi hutan Indonesia yang seharusnya bisa menjadi paru-paru dunia terhambat karena pemerintah tidak peka pada masalah lingkungan. Konsep *carbon trading*, yakni memberikan penalti finansial kepada industri yang menghasilkan karbondioksida di atas kadar normal, tidak digunakan Indonesia. Hanya Tiongkok dan negara berkembang lainnya yang menerapkan sistem tersebut.

Mengenai pengajuan *debt to nature swap* yang dulu pernah dilakukan Indonesia kepada Jerman, Rizal menanggapinya dengan pesimistis. Cara tersebut kemungkinan hanya berhasil pada Jerman, mengingat upaya mencari kompensasi dana yang dilakukan oleh Presiden RI masih kurang aktif. [EAS/W-12/E-7]

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup